

INDUSTRI PERTAHANAN SEKTOR MARITIM DALAM NEGERI SEBAGAI UJUNG TOMBAK PERKUATAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN TNI-AL MELAKSANAKAN TUGAS POKOK SEBAGAI KOMPONEN UTAMA PERTAHANAN MATRA LAUT

Wihartono

Perwira Mahasiswa Dikreg Seskoal Angkatan 61 TA 2023

Email : Wihartonoajja@gmail.com

<http://doi.org/10.52307//jmi.v912.135>

Abstrak

Industri Pertahanan dunia sarat akan intrik dan kepentingan politik. Meski secara massal industri ini melakukan proses jual beli antar negara, demi kepentingan tertentu, alutsista yang diperdagangkan dikurangi kemampuan teknis utamanya kesenjataan. Hal ini terkait dengan teori *Security Dilemma* dimana kekuatan satu negara jangan sampai melebihi negara lain. TNI-AL selaku komponen utama pertahanan matra laut sangat bergantung pada unsur KRI berikut sistem kesenjataannya. Untuk itu, perlu senantiasa dikembangkan keberadaan Industri Pertahanan sektor Maritim demi keterlaksanaanya tugas TNI-AL.

Kata Kunci : Industri Pertahanan, Sektor Maritim, Perkuatan Alutsista TNI-AL.

Abstract

The world's defense industry is full of intrigue and political interests. Even though this industry mass-produces buying and selling processes between countries, for certain interests, the defense equipment being traded is reduced by technical capabilities, especially weapons. This is related to the Security Dilemma theory where one country's strength should not exceed that of another country. The TNI-AL as the main component of maritime defense is very dependent on the elements of the KRI and its weapons systems. For this reason, it is necessary to continuously develop the existence of the Maritime Defense Industry in order to carry out the TNI-AL's tasks.

Keywords: *Maritime sector Defense Industry, Strengthening of the Indonesian Navy's Defense Equipment System.*

PENDAHULUAN

Perkembangan Industri Pertahanan global mengalami perubahan drastis dalam kurun waktu satu abad kebelakang. Diawali dengan penemuan-penemuan ajaib

dibidang mekanikal alat berat, kemaritiman (kapal) dan dirgantara (pesawat) yang dimanfaatkan oleh negara-negara adidaya kala itu (Abad 19) untuk memperkuat perkesenjataan dan perlengkapan militer hingga puncaknya penemuan material

pembuat bom bertenaga atomik (Abad 20) yang kemudian mengakhiri Perang Dunia II.

Pasca Perang Dunia II, perlombaan untuk menunjukkan dominasi antar negara kuat (Amerika Serikat dan Uni Sovyet-telah bubar dengan penerus saat ini Russia) membuat dunia berada pada suatu fase-perang dingin.

Kala itu kedua pemimpin kutub militer mengembangkan berbagai penelitian dan pengembangan dibidang kesenjataan sehingga menciptakan situasi persaingan yang berimbang pada pasar industri pertahanan (Bitzinger, 2009). Pertahanan adalah salah satu muara perkembangan teknologi militer karena pada dasarnya, perkembangan teknologi militer ini demi memperkuat pertahanan sehingga kemungkinan agresi atas diri akan menjadi minimalis dari mereka yang berseberangan baik dari segi politik, ideologi dan lainnya.

Indonesia, sejak awal merdeka mendapat berbagai hibah warisan pemerintah kolonial Belanda berupa alutsista-Alat Utama Sistem Senjata hingga infra struktur dibidang industri yang dapat diperuntukkan menjadi Industri Pertahanan.

Industri-industri tersebut, tahun 1983 disatukan oleh pemerintah RI dalam satu wadah Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) di bawah Dewan Pembina dan Pengelola Industri Strategis (Kertas Negara, 1983) yang bertujuan untuk

memacu kemandirian Industri Pertahanan menghadapi pengaruh politik dunia dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista bagi komponen utama pertahanan (TNI).

Hal ini dipandang perlu dilakukan mengingat perang dingin mengakibatkan masing-masing pihak (Amerika dan Uni Sovyet) saling menetapkan kebijakan keras hingga embargo, demi mempertahankan supremasinya kepada negara-negara konsumen pembeli alutsista. Tekanan politik sangat berpengaruh pada pertahanan sebuah negara termasuk Indonesia. Contohnya, embargo Amerika kepada Indonesia membuat KRI pesanan Indonesia kepada pihak asing mengalami keterbatasan kesenjataan.

Untuk itu, kemandirian harus diraih Indonesia dalam pemenuhan alutsista. Industri Pertahanan di bidang ke-Maritiman dalam negeri harus memacu diri terus berkembang untuk memperkuat kemampuan TNI-AL. Karena dasar ini, naskah terkait Industri Pertahanan Maritim dalam negeri sebagai ujung tombak perkuatan alutsista TNI-AL melaksanakan tugas pokok sebagai komponen utama pertahanan matra laut disusun.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih untuk menyusun naskah ini adalah deskripsi analisis. Dalam naskah, penulis menyajikan keberadaan Industri Pertahanan khususnya di bidang Maritim dan Industri Petahanan bidang

persenjataan dalam negeri sebagai elemen penting dalam pemenuhan Alutsista bagi TNI-AL. Selanjutnya dianalisis sejauh mana peranan Industri ini saat ini dan peluang perkembangannya.

PEMBAHASAN

Embargo pernah menjadi momok besar bagi keberlangsungan dan pengembangan TNI-AL, sebuah upaya strategis ketika dalam pengadaan unsur KRI dilengkapi dengan

kelengkapan kesenjataan dan amunisinya. TNI-AL berdasarkan UU senantiasa memberikan prioritas perhatian kepada Industri Pertahan sektor Maritim dan industri persenjataan dalam negeri.

Terkait industri ini, sejak munculnya Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 terkait peleburan berbagai industri strategis kedalam satu wadah membuat TNI-AL memiliki sumber pemasok perkuatan Alutsista dan tidak sepenuhnya bergantung dengan luar negeri.

Beberapa industri strategis yang disebutkan Keputusan Presiden ini yang memiliki kemampuan menjadi ujung tombak TNI-AL dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista antara lain; PT PAL (Perusahaan Galangan Kapal); PT Pindad (Perusahaan Kesenjataan dan Amunisi); PT Dahana (Perusahaan Pembuat Bahan Peledak). Pada Tahun 1990 satu buah BUMN bidang galangan dimasukkan

kedalam kelompok ini, yaitu PT DKB-Dok dan Perkapalan Kodja Bahari yang kala itu merupakan perusahaan baru hasil penggabungan 4 buah BUMN perkapalan serta industri maritim lain yang dimiliki swasta dengan kemampuan tertentu yang dapat dimanfaatkan TNI-AL.

PT Penataran Angkatan Laut, atau PT PAL berdiri sejak masa kolonial (tahun 1939) dengan nama *Marine Establishment*. Berlokasi di jantung Koarmada II Republik Indonesia-Kota Surabaya PT. PAL adalah BUMN dengan fasilitas galangan kering terbesar di Indonesia. eksistensi PT PAL dalam perkuatan Alutsista untuk TNI-AL dimulai pada tahun 1983 dimana kala itu, melalui proses *Transfer of Technology-ToT* dengan perusahaan *Friedrich Lurssen Werft* (Jerman) PT. PAL berhasil membangun kapal patroli cepat yang dikenal sebagai KCT (Kapal Cepat Terpedo) Kelas Andau sejumlah 4 unit; KRI Andau-650; KRI Singa-651; KRI Tongkak-652 dan KRI Ajak-653. Disebut KCT karena senjata utamanya adalah torpedo berpandu AEG SUT disamping senjata-senjata lainnya (Fajardin, 2022).

Proses ToT tidak berhenti sampai disini, memasuki tahun 2000-an, menyambut gayung *blue print* TNI-AL, PT. PAL berhasil melakukan percepatan sehingga saat ini mampu membangun berbagai alutsista yang menjadi andalan TNI-AL dan Angkatan Laut negara tetangga masa kini.

Landing Platform Dock (LPD) Kelas dr. Wahidin Sudirohusodo. Total hingga saat ini, PT PAL berhasil membangun 7 LPD berbagai kelas dengan 2 unit berhasil dieskpor ke Phillipina-memperkuat Angkatan Laut negeri itu dan saat ini Phillipina kembali memesan 2 unit LPD (Patisina, 2022). LPD merupakan salah satu solutif bagi negara dengan karakter kepulauan luas yang dikelilingi samudera. Memiliki dimensi panjang hingga minimal 110 meter hingga sekitar 130 meter (yang terbesar), LPD dapat mengangkut berbagai alutsista di geladak dan lambungnya. Selain itu, LPD mampu mengangkut personel militer dalam jumlah besar.

Selain itu, saat ini PT PAL juga berhasil membangun kapal tempur terancangih yang dioperasikan oleh TNI-AL, Fregat Kelas Martadinata; KRI Raden Edy Martadinata- 331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 (Antara, 2018). Tercanggih karena selain mengusung berbagai senjata peperangan atas air dan bawah air, Fregat Kelas Martadinata mengusung teknologi SIGMA- *Ship Integrated Geometrical Modularity Approach* sehingga minimal deteksi terhadap radar lawan (Hasil ToT dengan galangan Damen-Belanda).

Terbaru dan paling menjadi perhatian adalah keberhasilan PT. PAL membangun kapal selam pertamanya untuk TNI-AL, KRI Alugoro-405 (23 Agustus 2021). Kapal selam ini hasil kerjasama dengan *PT Daewoo Ship-DSME* Korea Selatan.

Meski saat ini pembuatan KRI Alugoro-405 masih dalam bentuk penyusunan konstruksi. Menteri Pertahanan RI-Prabowo Subianto mengharapkan dalam kurun 5 tahun kedepan, PT PAL mampu membangun Kapal Selam secara Mandiri (PAL, 2021).

Total, sepanjang pengabdian, PT PAL telah memproduksi lebih dari 20 Kapal untuk memperkuat TNI-AL dari berbagai macam ukuran dan tipe.

PT DKB. Terlahir dari hasil penggabungan 4 buah perusahaan galangan; PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priuk; PT Kodja; PT Pelita Bahari-PT Dok dan Galangan Kapal Nusantara. Karena merupakan hasil penggabungan, lokasi produksi dan galangannya tersebar di beberapa kota antara lain, Sabang, Pulau Batam, Palembang, Cirebon, Semarang dan Banjarmasin dengan kantor pusatnya di Jakarta.

Seperti PT PAL, PT DKB telah memproduksi berbagai jenis alutsista bagi TNI-AL, utamanya tipe Kapal Bantu dan Kapal Amfibi. Yang pertama kapal bertipe tunda samudera hasil ToT dengan *Daesun Shipbuilding*-Korea Selatan tahun 2002. KRI Sopotan-923 dan KRI Leuser-924. Kedua kapal ini adalah kapal tunda terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jenis kapal ini selain memiliki kemampuan pertolongan dan evakuasi atas kapal lain yang memiliki masalah di laut juga dilengkapi kemampuan

Hidroceanografi. Kemampuan kapal tunda samudera ini sangat penting bagi memastikan keamanan kapal-kapal lain ketika melakukan operasi.

Selanjutnya, PT DKB berhasil membangun Kapal Bantu Cair dan Kapal Amfibi. Masing-masing, memiliki ukuran panjang 122,40 meter dengan kapasitas untuk minyak hingga 5.500 m³ dan kapal amfibi berukuran 117 meter yang mampu mengangkut tank kelas Leopard yang menjadi kebanggaan unsur kavaleri TNI-AD (Kemenhan,2012). KRI Tarakan-905, kapal tanker yang dilengkapi teknologi RAS (*Replenishment at Set*) yang membuat proses perbekalan ulang dapat dilakukan ditengah laut dengan kapal tetap dalam posisi berlayar. Untuk Kapal Amfibi, rencana sebanyak 4 kapal bertipe ini dibangun oleh PT. DKB dengan 1 unit direncana untuk TNI-AD.

Kapal Amfibi sebagai alutsista utama dalam operasi amfibi. Demi memperkuat kekuatan unsur angkut amfibi (Tank, kendaraan tempur hingga personel). PT DKB turut andil dengan membangun 2 kapal bertipe amfibi (dari rencana 3 unsur untuk TNI-AL dan 1 unsur untuk TNI-AD); KRI Teluk Kendari-518 dan KRI Teluk Kupang-519. Kedua kapal ini memiliki kemampuan angkut 10 unit tank Leopard 2A4 ditambah kendaraan tempur lain, pasukan sejumlah 361 personel dan dilengkapi heli deck serta hanggar yang mampu menampung 2

helikopter maritim.

Kapal-kapal produksi PT DKB, memperkuat Satuan kapal bantu (Satban) dan Satuan Amfibi (Satfib) jajaran Armada RI serta Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).

PT Pindad, merupakan salah satu perusahaan tertua di Indonesia yang berdiri tahun 1808 oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejarah PT ini diawali dengan pembangunan sebuah bengkel produksi, pemeliharaan dan perbaikan senjata di Kota Surabaya. Bengkel ini kemudian seiring berjalan waktu, berkembang menjadi perusahaan produksi senjata dan berbagai kelengkapannya seperti amunisi, bahan peledak dan laboratorium pengembangan.

Ketika Perang Dunia pertama melanda, pemerintah kolonial memutuskan untuk menggeser aset penting ini ke daerah lebih aman (masuk kedalam pulau) dan diputuskanlah Kota Bandung sebagai lokasi (1918-1920). Pertimbangannya, selain berada lebih ketengah Pulau Jawa, Kota Bandung memiliki perlindungan alami berupa perbukitan dan gunung yang mengelilingi. Selain itu akses menuju Bandung telah dilengkapi berbagai infrastruktur dan posisi geografisnya dekat dengan pusat pemerintahan, Jakarta (dahulu *Batavia*).

Sejak saat itu PT ini berkembang dengan pesat. Saat ini, PT Pindad memiliki 2 buah pabrik utama, Bandung untuk lokasi

pembuatan senjata dan kendaraan tempur dan Turen-Malang sebagai lokasi produksi amunisi serta bahan peledak.

Berbagai senjata berhasil diproduksi PT Pindad yang juga digunakan oleh TNI-AL seperti senapan serbu SS1 dan SS2, senapan tempur (utamanya untuk Korps Marinir TNI-AL) SM2,3,5 dan SMB-1, berbagai jenis pistol, senapan runduk (Sniper Rifle) hingga Howitzer ME-105.

Khusus untuk TNI-AL, PT Pindad mampu memproduksi berbagai perlengkapan bahari seperti *Naval seat*, *Jasa Steering gears*, *Towing winch* Kelautan, *Crane* hingga *Dbl drum mooring winch* dan *Electric anchor winch*.

PT. Dahana, terlahir dari TNI-AU bertransformasi menjadi perusahaan negara khusus memproduksi bahan peledak. PT ini berlokasi di Kota Subang-Jawa Barat. Selain memenuhi kebutuhan militer, PT Dahana juga memasok berbagai hal terkait bahan peledak kepada perusahaan-perusahaan industri pertambangan, peminyakan dan perusahaan lain yang membutuhkan jasa bahan peledak.

Fasilitas produksi PT Dahana antara lain, Pabrik Emulsi di Tasikmalaya, Pabrik Detonator (Berkolaborasi dengan PT Pindad), Pabrik Danfo, Pabrik khusus untuk bahan shape yang sangat vital bagi instalasi bawah air, dan gudang

penyimpanan produk dengan konsep berikat.

Selain keempat BUMN diatas, beberapa perusahaan sektor maritim swasta memiliki potensi dan telah turut memperkuat alutsista milik TNI-AL. PT **Palindo Marine Shipyard**, perusahaan galangan kapal di Pulau Batam ini mengawali peran sebagai pemasok alutsista TNI-AL dengan memproduksi Kapal Cepat Rudal (KCR) berdimensi 44 meter KRI Clurit-641 dan Kujang-642. Sesuai dengan namanya, kesenjataan utama kapal ini adalah rudal anti kapal C-705 (Produksi negara China). Saat ini PT Palindo Marine Shipyard selain memproduksi alutsista, juga memenuhi kebutuhan TNI-AL terkait kapal-kapal kecil untuk rescue dan patroli (Kemenhan, 2012).

PT Daya Radar Utama, PT DRU. Berbasis di Lampung perusahaan ini mampu memproduksi kapal-kapal angkut amfibi sejumlah 6 unsur yang saat ini menjadi tulang punggung utama TNI-AL. KRI Kelas Teluk Bintuni, diproduksi oleh PT DRU dengan mengambil cetak biru dari KRI Teluk Kendari-518 milik PT DKB. Dengan desain yang serupa, kapal-kapal produksi PT DRU dipersiapkan untuk menggantikan unsur LST (Landing Ship Tank) milik TNI-AL yang banyak diantaranya telah berumur lebih dari 30 tahun.

PT. Lundin Banyuwangi atau, **North Sea Boats** adalah perusahaan pembuat kapal internasional yang mengkhususkan diri dalam pembuatan kerajinan untuk aplikasi

militer, penegakan hukum, SAR, komersial, dan kinerja tinggi. Perusahaan hadir di Swedia, Singapura dan Indonesia, dengan kantor pusat berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. North Sea Boats didirikan pada tahun 2003 oleh John dan Lizza Lundin sebagai nama dagangnya PT Lundin Industry Invest (PT LII).

John Lundin sendiri, tumbuh dengan perahu, karena ayahnya Allan Lundin mendirikan perusahaan perkapalan di Swedia yang mengoperasikan galangan kapal termasuk galangan kapal Gotland dan Galangan Kapal Djupvik. John pertama kali datang ke Indonesia pada pertengahan 1990-an untuk menyelidiki peluang ekspansi perusahaan. Allan Lundin meninggal karena kanker pada tahun 1996, dan Swedia dijual. Namun John dan istrinya yang orang Indonesia Lizza pindah ke sana secara permanen. Setelah beberapa tahun memproduksi furnitur skala kecil untuk mendapatkan pengalaman budaya bisnis di sana, mereka mendirikan perusahaan pembuat kapal North Sea Boats pada tahun 2003.

Pabrik kapal yang berlokasi di Banyuwangi ini menggabungkan teknik konstruksi komposit berteknologi tinggi terbaru, seperti infus resin inti vakum permukaan ganda, dan menggunakan bahan dari pemasok terkemuka dunia seperti bala bantuan multi-aksial dari serat karbon dan Kevlar, dan inti PVC high-end. Model dari produk PT. Lundin Industry

Invest dikonfigurasi untuk melakukan tugas multi-peran, dalam berbagai lingkungan operasional. Kapal itu dilengkapi dengan diesel inboard, drive transom dan waterjet, atau oleh OBM.

Luas pabrik PT LII ini mencapai 380.000 meter persegi, dengan luas pabrik dalam ruangan 6.700 meter persegi. Ruang utama pabrik berukuran 80 x 20 x 18 meter, dengan kapasitas mencapai 500 ton vessel.

Dengan kapasitas pabrik sebesar ini, PT LII sudah memproduksi beragam kapal perang dan militer yang terdiri dari trimaran, catamaran dan monohul. PT LII mempekerjakan lebih dari dua ratus orang karyawan untuk membuat serat kaca dan bahan pendukung pembuatan kapal.

PT LII sudah mengantongi berbagai macam sertifikat. Untuk ekspor, PT LII sudah mendapatkan CE Export Certification. Tidak hanya itu, PT LII juga sudah mendapatkan ISO 9001 -2015. Untuk di dalam negeri, PT LII sudah mengantongi izin dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Industri Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Surat Izin Industri Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dari Bea Cukai, PT LII mendapat peringkat Grade A (Lundin, 2020).

KRI Golok-688, Kapal Republik Indonesia (KRI ini merupakan produksi PT.

LII yang diresmikan oleh Panglima TNI (Saat itu Kepala Staf TNI-AL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., di Galangan PT. Lundin Industry Invest, Banyuwangi, tanggal 21 Agustus 2021 (Bestari, 2021)

KRI Golok-688 jenis KCR Trimaran memiliki spesifikasi panjang seluruhnya (Loa) 62,53 meter, lebar 16 meter, tinggi kapal dari draft 18,7 meter dengan bobot 53,1 ton. Kecepatan maksimum 28 knots, kecepatan jelajah 16 knots, kapal perang ini dipersenjatai meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm serta mampu mengangkut 25 ABK.

KRI Golok-688, menggunakan bentuk lunas trimaran (Triplehull), triple hull tidak menimbulkan tahanan (resistance) yang besar terhadap gelombang, memiliki stabilitas yang baik, dan geladak yang lebih luas sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan. Kapal trimaran merupakan dimensi baru alutsista yang memperkuat TNI-AL.

Berdasarkan deskripsi ini, secara azasi industri galangan dan perkapalan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan unsur TNI-AL secara kuantitas. Pun ketika kelak TNI-AL memerlukan keberadaan Kapal Induk, PT PAL telah memiliki sebuah rancangan Kapal Induk Helikopter yang berbasis pada kapal cargo samudera, Star

50 yang menjadi salah satu *masterpiece* produksinya.

Kendala terbesar saat ini ada pada kemampuan produksi kesenjataan yang menjadi peran penting untuk sebuah unsur KRI. Dukungan dari industri dalam negeri terkait pasokan senjata, saat ini masih dominan ditujukan kepada TNI AD dan TNI AU. Perlu difikirkan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas unsur milik TNI-AL dengan menggunakan sistem kesenjataan produksi dalam negeri. Saat ini, selain kesenjataan perorangan dan tempur milik Korps Marinir, TNI-AL masih bergantung pada pasokan senjata dari perusahaan luar negeri.

Terkait hal ini, tahun 2021 Dinas Penelitian Pengembangan TNI AL (Dislitbangal) bersama Dinas Material Senjata dan Elektronika TNI-AL (Disenlekal) melakukan kunjungan ke PT Dahana, di Subang tanggal 25 Februari 2021 (Dahana, 2021). Kunjungan itu, seperti disampaikan Laksamana Pertama TNI Agus Karminto (Kadislitbangal), demi pemanfaatan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan TNI-AL dibidang bahan peledak dan amunisi. Hingga saat ini, TNI-AL belum pernah bekerjasama dengan PT Dahana terkait halini. Sebagai gambaran, PT Dahana secara rutin menjadi pemasok Bom P series hingga saat ini tengah melakukan penelitian dan pembangunan Bom NATO 250 untuk kepentingan TNI AU (Dahana, 2022). Bahkan, menurut sumber sejarah- PT

Dahana lahir dari rahim TNI-AU, didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan dinamit dan roket matra udara ini.

Peran industri dalam negeri sangat penting bagi TNI-AL. Selain untuk kemandirian, hal ini juga demi terjaminnya kesiapan alutsista dari segala aspek termasuk didalamnya kesenjataan. Karena itu adalah esensi dasar yang membedakan unsur KRI dengan kapal-kapal sipil.

Terkait pemanfaatan industri dalam negeri, pemerintah pun telah memberikan penekanan melalui Undang-Undang (UU) RI Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Kertas Negara, 2012). Dalam Undang-undang ini, seluruh komponen serta lembaga negara harus mendorong perkembangan industri pertahanan dalam negeri dan mengambil manfaat keberadaannya. Hakikatnya, Keberadaan industri strategis nasional ini sangat dibutuhkan dalam mendukung pengadaan alusista TNI AL serta sebagai transformasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, modern dan mandiri dalam bidang teknologi.

Selanjutnya mengacu pada UU RI Nomor 16 tahun 2012, pada Bagian Ketujuh yaitu Pengadaan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Pasal 43 menyebutkan bahwa:

1) Pengguna wajib menggunakan Alat

Peralatan Pertahanan dan Keamanan produksi dalam negeri.

2) Pengguna wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di dalam negeri.

3) Dalam hal Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada butir (1) belum dapat dipenuhi oleh Industri Pertahanan, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan produk luar negeri dengan pengadaan melalui proses langsung antar-pemerintah atau kepada pabrikan.

4) Dalam hal kepentingan strategis nasional, DPR memberikan pertimbangan dalam pengadaan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah.

KKIP sendiri adalah Komite Kebijakan Industri Pertahanan Nasional yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan RI. Komite ini sendiri memiliki tugas; Koordinator pelaksana dan pengendalian kebijakan nasional dibidang industri pertahanan, KKIP disini juga menjadi satu-satunya pintu untuk kerjasama dengan luar negeri terkait segala hal di bidang pengembangan Industri Pertahanan; Melakukan sinkronisasi kebutuhan alat pertahanan antara pengguna (TNI) dengan produsen (Industri Pertahanan) serta menentukan mekanisme pembelian dan penjualan alat dan

perlengkapan pertahanan kepada pihak asing; Menyusun rumusan kebijakan strategis di bidang industri pertahanan jangka menengah hingga panjang, menetapkan besaran jumlah kebutuhan alat dan peralatan pertahanan hingga merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan dalam negeri; Terakhir, KKIP melakukan standar Industri Pertahanan dan secara berkala mengevaluasi kebijakan terkait Industri Pertahanan.

PENUTUP

Industri Pertahanan dalam negeri adalah industri vital bagi perkuatan komponen pertahanan negara. Bagi TNI-AL industri ini telah memberi banyak manfaat dalam pemenuhan jumlah unsurnya. Kekurangan yang ada saat ini ada pada sistem kesenjataan dan segala hal terkait kelengkapannya. Untuk itu perlu disusun sebuah langkah strategis besar demi memperkuat kemampuan TNI-AL selaku Komponen Utama pertahanan matra laut NKRI. ***Jalesveva Jayamahe.***

REFERENSI

Bestari, N.P. (2021). Mengintip Kapal Peran KRI Golok-688, Alutsista baru TNI-AL. CNBC News. Co.id, diakses 7 Maret 2023.

Bitzinger, R.A. (2009). The Modern Defense Industry: Political, Economic, and Technological Issues California:

ABC CLIO.

Bramasta, D.B. (2022). Spesifikasi KRI Teluk Bintuni-520: Kapal Perang Produksi Dalam Negeri, Bisa Bawa 10 Tank. Kompas.com, diakses 7 Maret 2023.

Damen Grup, (2014). Korvet Sigma 9113. Wayback Machine, diakses 5 Maret 2023.

Fajardin, M.A. (2022). Spesifikasi dan Persenjataan KRI Ajak-653 Bikin Ngeri! Berikut Rinciannya. Sindonews.com, diakses 7 Maret 2023.

Jervis, R (1978). Cooperation Under Security Dilema. London : Cambridge University.

Kantor Berita Antara, (2018). Panglima kukuhkan nama KRI I Gusti Ngurah Rai. Antara News.co.od, diakses 7 Maret 2023.

Kemenhan RI (2012). Wamenhan Tinjau Potensi Sejumlah Perusahaan Galangan Kapal di Batam. Website Kementerian Pertahanan Indonesia, diakses 7 Maret 2023.

Kemenhan RI (2014). Wamenhan Resmikan Pembangunan Tiga Kapal Perang. Website Kementerian Pertahanan Indonesia, diakses 7 Maret 2023.

- Patisina, E.C (2022). Angkatan Laut Filipina Beli Dua Kapal Perang PT PAL. Kompas.co.id, diakses 7 Maret 2023.
- PT Dahana (2022). Begini, Sejarah BUMN Bahan Peledak Dahana. Website PT Dahana, diakses 7 Maret 2023.
- PT DKB, (2012). Tentang Kami. Website PT DKB, diakses 7 Maret 2023.
- PT Lundin (2020). North Sea Boats. Website PT Lundin, diakses 7 Maret 2023.
- PT Pal, (2021). Peresmian KRI Alugoro-405 Oleh Menteri Pertahanan RI. Website PT Pal, diakses 7 Maret 2023.
- PT Pindad (2010). Profil Perusahaan. Website PT Pindad, diakses 6 Maret 2023.
- Sekretariat Negara, (2012). Undang-Undang (UU) RI Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Kertas Negara.
- Sekretariat Negara, (1983). Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam [JDIH BPK RI]. Kertas Negara.